

Memutus Rantai Eksploitasi dan Subordinasi Perempuan Pekerja Pengurut Daun Kayu Putih di Kabupaten Buru

Pardamean Daulay¹, Sri Pujiati², Yuli Tirtariandi El Anshori³, Gilang Tresna Putra Anugrah⁴

¹Univesitas Terbuka, pardameandaulay@ecampus.ut.ac.id

²Univesitas Terbuka, sripujiati@ecampus.ut.ac.id

³ Universitas Terbuka, yulitirta@ecampus.ut.ac.id

⁴IPB University, gilangtresnaputra@apps.ipb.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan menganalisis fenomena eksploitasi tubuh dan subordinasi struktural yang dialami perempuan pekerja pengurut daun kayu putih di Kabupaten Buru. Dengan menggunakan kerangka sosiologi tubuh dan relasi patron-klien, studi ini membedah bagaimana tubuh pekerja perempuan dikonstruksi sebagai modal utama (body capital) yang dieksploitasi melampaui batas biologis demi kelangsungan ekonomi keluarga. Melalui metode kualitatif fenomenologis dengan wawancara mendalam terhadap 24 informan yang dipilih secara purposive, penelitian ini menunjukkan bahwa lonjakan permintaan minyak kayu putih tidak berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan pekerja. Hal ini disebabkan oleh sistem upah yang sangat rendah (Rp1.000/kg) serta ketergantungan struktural pada patronase juragan sebagai jaring pengaman sosial semu. Temuan ini menyimpulkan bahwa adaptasi fisik ekstrem melalui perpanjangan jam kerja merupakan strategi bertahan hidup yang paradoks, dimana di satu sisi menjaga stabilitas ekonomi rumah tangga, namun di sisi lain melanggengkan posisi subordinat dan mengakibatkan kerusakan fisik jangka panjang.

Kata Kunci: Sosiologi Tubuh; Strategi Nafkah; Patron-Klien; Eksploitasi; Perempuan Pekerja, minyak kayu putih

1. PENDAHULUAN

Kabupaten Buru merupakan episentrum produksi minyak kayu putih nasional yang mengalami lonjakan permintaan pascapandemi COVID-19 (Rimbawanto dkk., 2021). Namun, pertumbuhan sektor yang masif ini berbanding terbalik dengan kondisi kesejahteraan perempuan pekerja pengurut daun minyak kayu putih yang berada di garis depan produksi (Daulay, Umanailo, dan Pujiati, 2024). Data Badan Pusat Statistik Kabupaten Buru (2021) menunjukkan tingginya angka kemiskinan di wilayah sentra produksi minyak kayu putih, seperti Kecamatan Waplau yang mencatat 1.579 keluarga miskin dan Kecamatan Fena Leisela dengan 2.583 keluarga miskin. Di tengah desakan ekonomi akibat kemiskinan struktural tersebut, perempuan pekerja menghadapi kondisi kerja yang berat dengan upah

yang sangat rendah, yakni sekitar Rp1.000 per kilogram daun minyak kayu putih (Waemesse dkk., 2020). Guna mengejar kecukupan pendapatan rumah tangga, para perempuan ini terpaksa mengambil keputusan yang berisiko dengan memangkas siklus pengumpulan daun dari yang idealnya 30 hari menjadi hanya 8 hari. Implikasi dari percepatan siklus tersebut adalah bertambahnya jam kerja fisik secara drastis hingga mencapai 10–12 jam per hari, suatu bentuk eksploitasi waktu dan tenaga yang berlangsung tanpa adanya jaminan kesehatan kerja (Hamiru, Umanilo, dkk., 2019; Doran dkk., 2021; Daulay, Umanilo, dan Pujiati, 2024).

Penelitian ini membedah fenomena kemiskinan struktural tersebut dengan berfokus pada perspektif sosiologi tubuh yang didukung oleh analisis relasi patron-klien. Karena keterbatasan akses terhadap sumber daya finansial dan pendidikan, perempuan pekerja terpaksa menjadikan kekuatan fisiknya sebagai modal utama (*body capital*) untuk ditukar dengan upah (Bourdieu, 1984). Rasa sakit akibat beban kerja yang ekstrem kerap diabaikan sehingga membentuk *habitus* kemiskinan, yaitu kondisi ketika penderitaan fisik diterima sebagai rutinitas yang wajar oleh seorang "pejuang keluarga". Praktik ini relevan dengan konsep *docile bodies* dan *bio-power* (Foucault, 1977), yang menjelaskan bahwa daya tahan tubuh perempuan didisiplinkan melalui sistem pengupahan agar tetap produktif demi akumulasi target produksi, tanpa disertai jaminan perlindungan kesehatan yang memadai.

Eksplorasi fisik tersebut semakin diperparah oleh struktur relasi patron-klien antara pekerja dan pemilik lahan (juragan). Relasi ini tampak sebagai jaring pengaman sosial pada situasi darurat, tetapi dalam praktiknya bersifat mengikat. Sebagai contoh, ketika keluarga pekerja membutuhkan biaya untuk pengobatan atau kebutuhan pokok, mereka meminjam uang melalui sistem *kasbon* kepada juragan. Konsekuensinya, mereka wajib terus menyeter tenaga dengan harga yang telah ditetapkan secara sepihak oleh juragan sehingga pekerja terjebak dalam lingkaran utang dan ketergantungan (Devereux dkk., 2020).

Selama ini, penelitian terdahulu mengenai komoditas kayu putih mayoritas berfokus pada aspek teknis agronomi, seperti optimalisasi pemuliaan tanaman dan peningkatan rendemen minyak atsiri (Rimbawanto dkk., 2021), atau pada aspek manajemen ekonomi mikro yang berorientasi pada efisiensi biaya produksi dan penguatan kapasitas rantai pasok industri skala kecil (Indrajaya dkk., 2013). Kajian sosiologis yang secara khusus menyoroti irisan antara eksploitasi fisik perempuan marginal dan hegemoni patronase di sektor ekstraktif lokal masih relatif terbatas. Meskipun Umanilo (2019) telah menginisiasi analisis sosiologis mengenai strategi bertahan hidup masyarakat pedesaan di Pulau Buru, fokus kajiannya masih berada pada aras adaptasi kultural petani terhadap perubahan lanskap pertanian secara umum. Di sisi lain, analisis mengenai ekonomi domestik pekerja perempuan pengurut daun telah diperdalam oleh Daulay, Umanilo, dan Pujiati (2024), yang secara khusus membahas tingkat pendapatan (*income*) perempuan pengurut daun kayu putih pascapandemi COVID-19. Studi tersebut memberikan kontribusi empiris mengenai kerentanan finansial dan fluktuasi pendapatan yang dihadapi pekerja perempuan di tengah pemulihan ekonomi lokal dan dinamika kebijakan infrastruktur pedesaan. Namun, perhatian terhadap hubungan kausal antara kerentanan pendapatan pascapandemi dan pendisiplinan tubuh biologis perempuan di bawah kendali patronase yang asimetris di Kabupaten Buru masih menyisakan celah akademis (*empirical gap*) yang cukup besar. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya

menjembatani celah tersebut dengan mengintegrasikan analisis sosiologi tubuh dan struktur patronase secara komprehensif.

Secara spesifik, penelitian ini difokuskan untuk mengkaji bagaimana praktik eksploitasi tubuh dan subordinasi pekerja perempuan dipertahankan dalam rantai produksi minyak kayu putih, serta merumuskan model transformasi sosial yang emansipatif melalui optimalisasi modal sosial horizontal yang mereka miliki. Kajian ini menjadi sangat krusial dan relevan karena arah kebijakan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan visi pembangunan Asta Cita yang diusung pemerintah di bawah kepemimpinan Prabowo–Gibran menitikberatkan pada pembangunan ekonomi dari desa serta percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem. Tanpa adanya evaluasi kritis berbasis empiris terhadap kondisi subordinasi di tingkat lokal, visi besar pembangunan nasional berisiko menjadi bias dan mengabaikan perlindungan hak-hak pekerja perempuan pada tingkat paling bawah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan mengonstruksi pemahaman sosiologis yang mendalam mengenai relasi eksploitatif tersebut sebagai pijakan awal untuk mendekonstruksi struktur patronase yang timpang demi mewujudkan kesejahteraan yang berkeadilan dan keberlanjutan penghidupan (*sustainable livelihood*) bagi perempuan pekerja di wilayah pedesaan.

2. METODE PENELITIAN

Studi ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Pendekatan fenomenologi digunakan untuk memahami secara mendalam struktur kesadaran, pengalaman hidup (*lived experiences*), serta motif subjektif yang melandasi strategi adaptasi fisik dan relasi sosial perempuan pekerja (Sundler dkk., 2019; Williams, 2021). Pengumpulan data primer dilakukan melalui observasi langsung terhadap rutinitas harian informan serta wawancara mendalam (*in-depth interviews*), baik secara tatap muka maupun daring. Pemilihan informan menggunakan teknik *purposive sampling* (Creswell dan Creswell, 2023) yang melibatkan 24 informan kunci. Untuk memperoleh triangulasi perspektif yang komprehensif, informan tersebut dibagi ke dalam tiga kelompok, yaitu 16 perempuan pengurut daun kayu putih sebagai subjek utama untuk menggali pengalaman secara langsung, 4 pemilik lahan (juragan) untuk membedah dinamika relasi patronase, dan 4 pembeli daun untuk memahami konteks rantai ekonomi.

Penelitian lapangan dilaksanakan di empat wilayah konsentrasi pekerja, yaitu Desa Miskoko, Waplau, Wamlana, dan Waeperang di Kabupaten Buru. Untuk menganalisis data kualitatif yang diperoleh, penelitian ini menggunakan teknik *Interpretative Phenomenological Analysis* (IPA) yang dipadukan dengan tahapan analisis model Colaizzi. Analisis data (*thematic analysis*) dilakukan secara sistematis melalui beberapa tahapan, yaitu: (1) membaca berulang kali seluruh transkrip wawancara untuk menyatu dengan pengalaman subjek; (2) mengekstraksi pernyataan-pernyataan signifikan (*significant statements*) yang berkaitan langsung dengan fenomena eksploitasi dan adaptasi; (3) merumuskan makna dari setiap pernyataan tersebut; (4) mengelompokkan makna-makna yang relevan ke dalam kluster tema utama; dan (5) mengintegrasikan seluruh tema ke dalam deskripsi naratif yang mendalam untuk mengungkap struktur fundamental pengalaman perempuan pengurut daun kayu putih.

3. ANALISIS DATA

3.1. Eksploitasi Tubuh: Komodifikasi dan Pendisiplinan Tubuh

Pengumpulan data lapangan melalui pendekatan fenomenologis di Desa Miskoko, Desa Waplau, Desa Wamlana, dan Desa Waeperang menyingkap realitas empiris mengenai tingginya tingkat kerentanan perempuan pekerja di sektor penyulingan minyak kayu putih. Para perempuan pengurut daun di keempat lokasi tersebut secara konsisten melakukan adaptasi fisik yang ekstrem sebagai mekanisme utama untuk mempertahankan keberlangsungan hidup rumah tangga. Kerentanan sosial-ekonomi ini berakar pada struktur pengupahan yang sangat timpang dalam rantai produksi. Meskipun minyak kayu putih memiliki nilai jual yang tinggi di pasaran, tenaga kerja perempuan yang menyortir dan memisahkan daun dari rantingnya hanya dihargai dengan upah sebesar Rp1.000 per kilogram daun bersih. Akumulasi pendapatan yang minim memaksa mereka mengabaikan batas biologis tubuh demi mengejar volume daun yang lebih besar setiap harinya. Kondisi tersebut tergambar dalam dinamika durasi kerja sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. *Perbandingan Lama Bekerja dan Adaptasi Fisik Perempuan Pekerja Pemetik Daun Minyak Kayu Putih*

Nama Desa	Siklus Produksi Normal	Siklus Produksi Pandemi	Rata-rata Jam Kerja Harian	Beban Fisik Utama (Otot Dominan)
Waplau	14 – 30 hari	8 – 10 hari	± 8 jam	Tangan dan Lengan (Cengkeraman dan tarikan repetitif)
Miskoko	14 – 30 hari	8 – 10 hari	8 – 10 jam	Bahu dan Punggung (Mengurut dan memikul beban)
Wamlana	14 – 30 hari	8 – 10 hari	7 – 8 jam	Bahu dan Punggung (Mengurut dan memikul beban)
Waeperang	14 – 30 hari	8 – 10 hari	10 – 12 jam	Bahu dan Punggung (Beban kerja paling tinggi)

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2026.

Rendahnya kompensasi finansial tersebut memaksa para informan memperpanjang jam kerja harian secara drastis. Jika dalam kondisi normal pekerjaan kasar semacam ini dilakukan dalam rentang waktu 6 hingga 8 jam, perempuan pengurut daun, terutama di Desa Waeperang, menghabiskan waktu antara 10 hingga 12 jam per hari di lokasi penyulingan atau kawasan hutan tempat pengumpulan bahan baku. Fenomena ini memperlihatkan eskalasi eksploitasi tenaga kerja yang didorong oleh desakan kebutuhan ekonomi yang semakin

menghimpit. Salah seorang pekerja di Desa Waeperang mengutarakan kecemasan dan ketakutannya apabila harus berhenti bekerja akibat kelelahan.

"Kalau beta seng kerja hari ini, rumahtangga mau makan apa besok? Biar badan sakit semua, punggung belakang rasa mau patah, beta musti paksa urut daun dari pagi buta jam lima sampai petang. Kalau libur satu hari saja, uang dapur seng ada, jadi biar rasa lelah bagaimanapun musti tahan." (Wawancara Informan di Desa Waeperang).

Tekanan untuk segera mengonversi hasil kerja menjadi uang tunai pada gilirannya mengubah ritme produksi secara keseluruhan. Temuan lapangan mencatat adanya pemangkasan waktu produksi atau siklus kerja yang sangat signifikan. Pekerja perempuan yang sebelumnya memiliki keleluasaan menyelesaikan satu siklus pengumpulan dan penyortiran daun dalam waktu 14 hingga 30 hari, kini memangkas durasi tersebut menjadi hanya 8 hingga 10 hari. Pemampatan waktu ini mengindikasikan intensitas kerja yang berlipat ganda dalam rentang waktu yang jauh lebih singkat, sehingga berdampak langsung pada kelelahan fisik yang ekstrem. Rasa lelah kronis tersebut bukan lagi sekadar keluhan biologis, melainkan representasi dari ketakutan mendalam akan hilangnya sumber nafkah rumah tangga.

Beban fisik yang ditanggung oleh pekerja perempuan ini bermanifestasi pada eksploitasi kelompok otot tertentu yang spesifik, bergantung pada topografi lingkungan kerja dan metode pengumpulan di masing-masing desa. Di Desa Waplau, proses ekstraksi menuntut dominasi penggunaan otot tangan dan lengan karena karakter ranting serta teknik pemisahan daun membutuhkan cengkeraman dan tarikan yang dilakukan secara repetitif. Sebaliknya, di Desa Miskoko, Wamlana, dan Waeperang, beban fisik terbesar bertumpu pada otot bahu dan punggung. Selain mengurut daun, mereka juga harus memikul dan memindahkan karung berisi daun kayu putih melintasi medan bergelombang menuju lokasi penyulingan utama. Pola pembebanan fisik yang tidak proporsional ini menempatkan tubuh pekerja sebagai satu-satunya aset produktif yang terus dieksploitasi demi memenuhi kebutuhan keluarga. Kondisi kelelahan kronis akibat pengerahan tenaga yang melampaui kapasitas tersebut mencerminkan kegagalan sistem perlindungan pekerja di tingkat akar rumput.

Secara sosiologis, melalui teori praktik Pierre Bourdieu (1984), realitas di keempat desa tersebut menegaskan bahwa tubuh perempuan pengurut daun telah mengalami dehumanisasi dan komodifikasi. Tubuh tidak lagi dipandang sebagai entitas biologis yang otonom, melainkan dikonversi secara paksa menjadi *body capital* (modal tubuh) yang dieksploitasi melampaui ambang batas fisiologisnya. Di dalam *field* (ranah) produksi minyak kayu putih pedesaan yang timpang, kekuatan otot menjadi modal utama yang mengalami devaluasi secara ekstrem untuk ditukar dengan modal ekonomi berupa upah subsisten. Karena modal fisik tersebut berdiri sendiri tanpa didukung oleh modal budaya (*cultural capital*), seperti pendidikan formal, serta modal sosial (*social capital*) yang memadai, posisi tawar perempuan marginal di hadapan pemilik modal menjadi sangat lemah. Kondisi ini mengakibatkan terjadinya "depresiasi modal" yang destruktif, yaitu ketika aset biologis berupa tubuh dihancurkan secara bertahap demi mempertahankan keberlangsungan hidup sehari-hari.

Keterpautan tubuh dengan rasa sakit sehari-hari diartikulasikan secara jujur oleh seorang

pengurut daun di Desa Waplau.

"Tangan dong kaku tiap malam, jari-jari rasa kram kalau mau tidur, leher dengan bahu tegang sekali karena urut ribuan ranting tiap hari. Tapi ini satu-satunya jalan cari uang yang beta bisa. Rasa sakit itu su biasa, musti telan saja harian demi anak-anak punya sekolah." (Wawancara Informan, pekerja perempuan di Desa Waplau).

Hasil wawancara tersebut memperlihatkan bekerjanya *habitus* kemiskinan. *Habitus*, dalam pengertian Bourdieu, merupakan *structured structures* sekaligus *structuring structures*. Penderitaan fisik dan kelelahan kronis tidak lagi diidentifikasi sebagai bentuk pemerasan struktural, melainkan diinternalisasi, diendapkan, dan mewujudkan (*embodied*) menjadi disposisi mental yang menganggap rasa sakit sebagai kewajaran dalam menjalankan peran sebagai "pejuang keluarga". Kesadaran kritis subjek terhadap eksploitasi dikaburkan oleh normalisasi penderitaan fisik demi mempertahankan fungsi subsistensi rumah tangga.

Secara teoretis, pendisiplinan tubuh yang ekstrem ini sejalan dengan konsep Michel Foucault mengenai *docile bodies* (tubuh yang patuh). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemilik industri penyulingan tidak memerlukan institusi panoptik formal ataupun mekanisme pengawasan langsung untuk menundukkan pekerja (Foucault, 1977). Struktur upah sebesar Rp1.000 per kilogram telah menjadi instrumen yang cukup untuk mendisiplinkan jam kerja, mengendalikan presisi gerakan tubuh, dan menekan pekerja perempuan agar tetap produktif. Kekuasaan bekerja bukan melalui koersi fisik secara langsung, melainkan terinternalisasi ke dalam anatomi tubuh pekerja yang secara sukarela mengorbankan daya tahan biologisnya demi mengejar akumulasi volume daun. Eksploitasi melalui pemangkasan siklus produksi dari 30 hari menjadi 8 hari membuktikan bahwa tubuh perempuan telah dikomodifikasi menjadi objek kapital yang kehilangan otonominya demi memenuhi target pendapatan harian.

Dengan demikian, strategi adaptasi fisik yang dilakukan oleh para pengurut daun di Kabupaten Buru bukan merupakan manifestasi dari *rational choice* yang bebas ataupun bentuk kelenturan agensi lokal. Sebaliknya, fenomena ini merupakan wujud keterpaksaan struktural yang mengorbankan integritas fisik, mereduksi otonomi tubuh, dan secara sosiologis melanggengkan posisi subordinasi gender perempuan dalam jangka panjang.

3.2. Hegemoni Patron-Klien: Jaring Pengaman Semu

Kondisi kerentanan yang dialami oleh perempuan pengurut daun kayu putih tidak dapat dilepaskan dari konteks struktural ekonomi pedesaan di Kabupaten Buru. Temuan lapangan secara gamblang menunjukkan bahwa mayoritas rumah tangga di keempat desa lokasi penelitian memiliki tingkat ketergantungan yang sangat tinggi terhadap sumber daya alam, khususnya industri penyulingan minyak kayu putih (*Melaleuca cajuputi*). Ekosistem hutan kayu putih endemik tersebut tidak sekadar menjadi latar geografis, melainkan telah menjadi tulang punggung perekonomian dan sumber penghasilan utama yang menentukan keberlangsungan ekonomi keluarga di wilayah tersebut (Ernawati dkk., 2021; Rimbawanto dkk., 2021). Sektor ekonomi lainnya, seperti pertanian lahan kering dan sektor informal, hanya berperan sebagai alternatif pemenuhan kebutuhan subsisten (Sumartono & Astria,

2018). Ketika hasil pertanian tidak mencukupi, hutan kayu putih selalu menjadi pilihan terakhir bagi masyarakat setempat.

Tabel 2. *Sumber Mata Pencapaian dan Ketergantungan Ekonomi Pekerja Perempuan di Kabupaten Buru*

Komponen Ekonomi	Deskripsi Temuan di Lokasi Penelitian (Miskoko, Waplau, Wamlana, Waeperang)
Sumber Nafkah Utama	Sektor Kehutanan Ekstraktif (Penyulingan Minyak Kayu Putih)
Sumber Nafkah Alternatif/Sampingan	Pertanian lahan kering, berkebun palawija subsisten, sektor informal berskala kecil
Tingkat Ketergantungan di Masa Krisis	Sangat Tinggi (Sektor alternatif tidak mampu menutupi kebutuhan keluarga saat pandemi)
Akses Keahlian / Vokasional	Rendah (Mayoritas hanya memiliki keahlian tunggal menyortir/mengurut daun)
Posisi Tawar (Bargaining Power)	Lemah (Sistem kerja dikendalikan penuh oleh pemilik lahan/juragan)
Sistem Pengupahan	Stagnan di angka Rp 1.000 / Kg daun bersih (Tidak sebanding dengan lonjakan harga jual minyak)

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2026.

Ketergantungan yang sangat tinggi tersebut memunculkan kerentanan baru ketika dihadapkan pada situasi krisis eksternal, seperti pandemi COVID-19. Bagi perempuan pengurut daun, ketiadaan alternatif sumber penghidupan pada masa krisis menyebabkan mereka tidak memiliki ruang untuk bermanuver. Implikasi paling krusial dari tingginya ketergantungan sektoral ini adalah melemahnya posisi tawar (*bargaining power*) perempuan pekerja secara drastis di hadapan pemilik lahan atau penyulingan yang secara lokal disebut sebagai juragan. Namun, dari perspektif fenomenologi, relasi sosial antara pekerja dan juragan tidak semata-mata dimaknai sebagai hubungan yang eksploitatif. Dalam kesadaran subjektif pekerja perempuan, relasi tersebut dipandang sebagai bentuk interaksi yang didasari oleh rasa saling membutuhkan (*mutual need*). Di satu sisi, juragan sangat membutuhkan ketekunan tenaga perempuan pengurut daun untuk memastikan kelancaran pasokan bahan baku di tengah tingginya permintaan pasar. Di sisi lain, di tengah ketakutan yang mendalam akan hilangnya mata pencaharian, para pekerja perempuan memandang juragan sebagai sosok pelindung utama.

Tabel 3. *Struktur Subordinasi dalam Rantai Produksi Kayu Putih*

Komponen Struktur	Realitas Empiris (Kabupaten Buru)	Status Sosiologis
Posisi Tawar	Lemah (Tunduk pada harga sepihak)	Subordinasi

	juragan)	
Akses Modal	Bergantung pada sistem "Kasbon"	Jerat Utang
Vokasional	Keahlian tunggal (Hanya mengurut daun)	Marjinalisasi Skill
Relasi Kuasa	Monopolistik (Juragan mengontrol bahan baku)	Hegemoni

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2026.

Pemaknaan relasi patronase ini terlihat jelas dari cara pekerja memosisikan juragan sebagai jaring pengaman sosial (*social safety net*) pada saat krisis. Ketika pekerja menghadapi kondisi yang mendesak, seperti kebutuhan biaya kesehatan, pendidikan anak, atau pemenuhan kebutuhan pangan, juragan hadir dengan memberikan pinjaman uang muka (*kasbon*) maupun bantuan bahan pokok. Hal tersebut tercermin dalam penuturan salah seorang informan berikut.

"Kalau anak sakit mendadak atau butuh beli beras, katong (kita) mau lari minta tolong ke mana lagi kalau bukan ke bos? Bos itu yang selalu bantu kasi kasbon duluan. Biar upah urut daun memang kecil, tapi yang penting bos baik, selalu ada, dan mengerti katong pung susah di kampung ini." (Wawancara Informan Pekerja Perempuan di Kabupaten Buru, 2024).

Kutipan tersebut menegaskan bahwa pekerja memaknai relasi ini melampaui sekadar hubungan antara pemberi kerja dan buruh. Di dalamnya terkandung nilai moral, utang budi, dan ikatan kekerabatan. Praktik negosiasi dalam hubungan kerja pun jarang diwujudkan dalam bentuk tuntutan kenaikan upah per kilogram. Negosiasi yang berkembang justru bersifat informal, seperti pemberian kelonggaran waktu kerja oleh juragan, kemudahan memperoleh *kasbon* secara mendadak, atau toleransi ketika kondisi fisik pekerja tidak lagi mampu menahan kelelahan yang ekstrem.

Akan tetapi, di balik rasa saling membutuhkan dan kelonggaran negosiasi tersebut, terselip hegemoni yang mengikat dengan sangat kuat. Ikatan utang budi dan pinjaman finansial yang terus berulang justru menciptakan jerat ketergantungan (*debt trap*). Rasa sungkan dan kepatuhan moral mendisiplinkan kesadaran perempuan pekerja untuk terus bekerja demi melunasi utang, yang pada akhirnya menghilangkan potensi perlawanan terhadap sistem pengupahan yang rendah. Jaring pengaman sosial ini memang berfungsi menyelamatkan kebutuhan hidup pekerja dalam jangka pendek, tetapi secara sistematis bersifat semu karena melanggengkan status subordinasi kelas dan menutup peluang perempuan pekerja untuk mencapai kemandirian ekonomi yang sejati.

Kepatuhan sukarela dan absennya konfrontasi dari pekerja perempuan dapat dipahami melalui tesis James C. Scott (1976) mengenai moral ekonomi petani. Scott berargumen bahwa dalam masyarakat subsisten, hubungan patron-klien dipandang sah dan bermoral selama patron memenuhi *norm of reciprocity* (norma timbal balik) serta menjamin *right to subsistence* (hak atas penghidupan minimum) bagi buruhnya. Bagi perempuan pengurut daun di Kabupaten Buru, fungsi juragan yang menyediakan *kasbon* ketika anak sakit atau keluarga

mengalami kelaparan dimaknai sebagai bentuk "asuransi sosial" lokal yang konkret. Upah sebesar Rp1.000 per kilogram tetap ditoleransi karena juragan bersedia menanggung risiko krisis keluarga melalui skema bantuan informal. Kontrak moral tersebut membuat para pekerja merasa berutang budi sehingga tindakan menuntut kenaikan upah dipandang dapat merusak keharmonisan relasi yang telah menjadi jaring pengaman mereka. Fenomena ini menunjukkan bahwa stabilitas sistem ekstraktif tidak dipertahankan melalui kekerasan fisik, melainkan melalui pemenuhan kebutuhan subsistensi minimum yang mengunci kesadaran kritis pekerja.

Jika Scott memandang hubungan tersebut sebagai kesepakatan moral yang bersifat defensif untuk mengamankan prinsip *safety-first*, Pierre Bourdieu (1990) melihatnya sebagai bentuk kekerasan simbolik (*symbolic violence*) yang bekerja melalui mekanisme *doxa*. Ungkapan informan bahwa "bos itu baik" merupakan bentuk *doxa*, yaitu kondisi ketika pekerja tidak lagi menyadari bahwa kebaikan juragan dalam memberikan *kasbon* sesungguhnya merupakan strategi reproduksi sosial untuk mempertahankan dominasi kelas. Dalam konseptualisasi Bourdieu, juragan melakukan konversi modal dengan mengubah modal ekonomi berupa *kasbon* menjadi modal sosial dan modal simbolik yang diwujudkan melalui citra sebagai "penyelamat" atau "pelindung kampung". Modal simbolik tersebut kemudian melahirkan kepatuhan yang kuat. Kondisi ini telah mengkristal menjadi *doxa*, yakni situasi ketika hubungan eksploitatif antara juragan dan pengurut daun dipandang sebagai tatanan yang alamiah (*natural order*), sehingga tidak lagi dipertanyakan. Kepatuhan moral pekerja bukan lagi merupakan pilihan yang sepenuhnya disadari, melainkan produk dari struktur *field* ekstraktif yang membentuk cara berpikir mereka hingga menerima ketundukan sebagai sesuatu yang wajar.

Apabila ditinjau dari perspektif Michel Foucault (1991), relasi patron-klien tersebut juga beroperasi melalui mekanisme *governmentality* (seni memerintah) yang termanifestasi dalam bentuk *pastoral power* (kekuasaan pastoral). Juragan di pedesaan Kabupaten Buru mengadopsi peran layaknya seorang gembala; mereka tidak mengendalikan pekerja melalui ancaman, melainkan dengan merawat dan mengenali kesulitan setiap pekerja secara personal. Kelonggaran waktu kerja, kemudahan memperoleh utang, dan toleransi terhadap kelelahan fisik merupakan bentuk *technologies of power* yang bekerja secara subtil. Kekuasaan pastoral ini memproduksi subjek perempuan yang mengawasi dirinya sendiri (*self-governing subjects*). Rasa sungkan, kesadaran untuk menjaga hubungan baik, dan beban moral akibat utang budi berfungsi sebagai mekanisme pendisiplinan internal yang jauh lebih efektif daripada pengawasan langsung. Akibatnya, potensi perlawanan ataupun pemogokan kerja dapat diredam bahkan sebelum muncul dalam kesadaran para pekerja, karena mereka memandang bahwa melawan juragan sama artinya dengan mengkhianati sosok yang menopang keberlangsungan hidup mereka.

3.3. Memutus Rantai Kemiskinan: Antara Solidaritas dan Transformasi Sosial

Meskipun terperangkap dalam jerat eksploitasi fisik dan hegemoni patronase, para perempuan pengurut daun tidak sepenuhnya kehilangan agensi sosialnya. Pendekatan fenomenologi dalam studi ini menyingkap adanya kesadaran kolektif dan modal sosial yang

kuat di antara sesama pekerja. Rasa senasib sepenanggungan akibat kelelahan fisik dan himpitan ekonomi menumbuhkan ruang hidup bersama yang egaliter. Mereka kerap mempraktikkan sikap tolong-menolong, seperti berbagi beban karung ketika rekan kerja mengalami kelelahan ekstrem atau saling meminjamkan bahan pokok antar-rumah tangga. Makna kedekatan sosial tersebut diungkapkan secara jujur oleh salah seorang informan.

"Katong di sini sama-sama orang susah. Kalau ada teman yang su (sudah) tidak kuat angkat karung atau tangannya kram, katong bantu bawa. Kalau di rumah seng ada beras, ya katong baku pinjam. Penderitaan ini katong rasa sama-sama."
(Wawancara Informan Pekerja Perempuan di Kabupaten Buru).

Gejala tolong-menolong antarsesama pekerja perempuan ini secara teoretis merefleksikan apa yang disebut Émile Durkheim (1984) sebagai *mechanical solidarity* (solidaritas mekanik). Dalam masyarakat pedesaan yang cenderung homogen dengan pembagian kerja yang belum terdiferensiasi secara kompleks, kohesi sosial terbentuk karena adanya *collective consciousness* (kesadaran kolektif) yang kuat. Kesadaran kolektif tersebut lahir dari kesamaan kepercayaan, sentimen, serta penderitaan hidup sehari-hari yang dialami bersama. Kelelahan fisik kronis dan rasa sakit pada otot tubuh yang dialami para perempuan pengurutan daun tidak berkembang menjadi kecemburuan sosial yang bersifat individual, melainkan menjadi perekat sosial yang semakin memperkuat kesamaan pengalaman mereka. Solidaritas mekanik ini memunculkan sanksi moral internal untuk saling menjaga keselamatan fisik sesama rekan kerja di tengah kerasnya aktivitas ekstraksi di kawasan hutan.

Tabel 4. Pemetaan Relasi Sosial dan Potensi Intervensi Pemberdayaan

Bentuk Relasi Sosial	Aktor yang Terlibat	Wujud Praktik / Mekanisme Bertahan Hidup	Implikasi Sosiologis terhadap Pekerja	Potensi Transformasi (Memutus Rantai)
Relasi Horizontal (Solidaritas Mekanik)	Sesama Perempuan Pengurutan Daun	Saling membagi beban kerja saat lelah; bertukar informasi lokasi bahan baku; meminjamkan bahan pokok antar-keluarga.	Memperkuat kohesi dan integrasi sosial; dukungan emosional; jaring pengaman subsisten yang bersifat egaliter.	Kolektivitas buruh & Koperasi perempuan
Relasi Vertikal (Patron-Klien)	Perempuan Pekerja (Klien) & Pemilik Lahan/Juragan (Patron)	Pemberian pinjaman uang muka (<i>kasbon</i>); akses utang darurat medis/pendidikan; pemberian bahan pokok di masa krisis.	Berfungsi efektif sebagai Jaring Pengaman Sosial (<i>Social Safety Net</i>) darurat; namun melanggengkan ketergantungan dan subordinasi kelas.	Transisi ke perlindungan sosial negara

Sumber: Hasil olahan peneliti, 2026.

Eksistensi solidaritas horizontal ini sekaligus membuktikan tersedianya modal sosial (*social capital*) yang melimpah di tingkat akar rumput. Mengacu pada konseptualisasi Francis Fukuyama (2000), modal sosial dipahami sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dipahami bersama oleh anggota kelompok sehingga memungkinkan terjadinya kerja sama di antara mereka. Unsur paling krusial dalam konsep modal sosial Fukuyama adalah kepercayaan (*trust*). Di empat desa lokasi penelitian, terdapat jaringan kepercayaan (*radius of trust*) yang sangat kuat dan bekerja secara internal di kalangan perempuan pengurut daun. Kebiasaan bertukar bahan pangan tanpa jaminan tertulis serta kesediaan memikul karung milik rekan yang mengalami kram mencerminkan tingginya nilai kebajikan sosial (*social virtue*). Kebajikan tersebut beroperasi atas dasar kejujuran dan resiprositas yang terbangun di antara sesama kelompok yang mengalami penindasan. Jaringan kepercayaan inilah yang menyelamatkan rumah tangga mereka dari kerentanan sosial yang lebih dalam ketika sistem upah murah menggerus daya hidup biologis mereka.

Temuan empiris mengenai kuatnya modal sosial ini sejalan dengan studi terdahulu yang dilakukan oleh Hamiru, Umanailo, dkk. (2019) mengenai dinamika pekerja minyak kayu putih di Desa Waplau, Kabupaten Buru. Studi tersebut menunjukkan bahwa modal sosial, yang terwujud dalam partisipasi, kepercayaan (*trust*), kerja sama, dan hubungan timbal balik (*reciprocity*), merupakan instrumen utama yang menggerakkan produktivitas sekaligus menopang keberlangsungan ekosistem penyulingan tradisional. Hamiru dkk. menemukan bahwa sirkulasi kerja harian yang sangat padat dijalankan atas dasar komitmen dan kesadaran kolektif, bahkan tanpa kontrak formal tertulis. Temuan tersebut menunjukkan bahwa energi sosial masyarakat pedesaan di Pulau Buru, baik di Desa Waplau maupun di lokasi penelitian ini, memiliki kesamaan struktur, yaitu ikatan emosional dan kerelaan bertindak yang berfungsi sebagai jaring pengaman subsisten ketika masyarakat menghadapi tekanan ekonomi.

Namun, signifikansi komparatif yang membedakan temuan penelitian ini dengan studi Hamiru dkk. (2019) terletak pada spektrum analisis strukturalnya. Jika dalam studi di Desa Waplau jaringan modal sosial horizontal dinilai mampu menciptakan relasi yang simetris, fungsional, dan saling menguntungkan antara pemilik lahan, penyewa, buruh (termasuk juragan, juru masak, dan pengurut daun), serta penadah, maka dalam konteks relasi kuasa perempuan pengurut daun di lokasi penelitian ini, modal sosial tersebut mengalami pembatasan ruang gerak. Menggunakan perspektif Fukuyama, modal sosial di sini masih berada pada tipe *bonding social capital* yang bersifat ke dalam (*inward-looking*). Sementara itu, relasi vertikal yang menghubungkan pekerja dengan pemilik lahan atau penadah dikonstruksi dalam bentuk patronase yang bias gender. Akibatnya, alih-alih menjadi modal untuk mendorong kemandirian ekonomi, modal sosial horizontal tersebut baru berfungsi sebagai instrumen bertahan hidup yang bersifat defensif (*hanging in*) guna menutupi dampak eksploitasi upah murah dan jerat utang *kasbon* dari patron.

Oleh karena itu, solidaritas horizontal Durkheim dan jejaring kepercayaan Fukuyama yang telah mengakar di tingkat lokal perlu dijadikan fondasi utama untuk memutus rantai kemiskinan struktural. Mengubah strategi yang semula hanya berorientasi pada bertahan hidup menjadi keberlanjutan penghidupan yang mandiri (*stepping up*) membutuhkan transformasi dari perjuangan individual yang mengandalkan eksploitasi fisik menuju gerakan

ekonomi kolektif yang terinstitusionalisasi. Model transformasi sosial yang direkomendasikan dalam penelitian ini berpusat pada pembentukan koperasi perempuan pengurut daun. Melalui wadah koperasi tersebut, modal sosial horizontal yang sebelumnya hanya berfungsi secara defensif dapat dikonversi menjadi kekuatan tawar kolektif (*collective bargaining*). Secara operasional, koperasi berfungsi sebagai pengepul utama hasil urutan daun kayu putih dari seluruh anggota. Dengan mengonsolidasikan pasokan bahan baku tersebut, perempuan pekerja memiliki kontrol yang lebih otonom dalam menetapkan standar harga jual yang rasional kepada pihak penyulingan, sekaligus membuka akses pasar secara langsung tanpa harus bergantung pada perantara patron tunggal.

Keberhasilan implementasi model koperasi dan kemandirian pasar tersebut membutuhkan sinergi antarpemangku kepentingan. Aktor utama yang harus mengambil peran adalah kelompok perempuan pekerja itu sendiri yang ditempatkan sebagai subjek yang berdaulat, bukan sekadar objek pekerja. Mereka perlu didampingi oleh fasilitator dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal yang berfokus pada pemberdayaan perempuan serta didukung oleh pemerintah daerah, khususnya Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Buru. Peran pemerintah daerah dan LSM sangat penting dalam memberikan pendampingan literasi keuangan, pelatihan manajemen kelembagaan dasar, serta memfasilitasi legalitas dan akses ke pasar alternatif berskala regional agar rantai pasok tidak lagi dimonopoli secara eksklusif oleh para juragan.



Untuk merepresentasikan alur emansipasi tersebut secara komprehensif, bagan di atas memvisualisasikan model transformasi sosial yang terstruktur. Model ini menempatkan modal sosial dasar di tingkat akar rumput, berupa solidaritas mekanik dan tingginya tingkat kepercayaan (*trust*) horizontal yang pada awalnya hanya dimanfaatkan untuk bertahan hidup, sebagai fondasi utama perubahan. Modal sosial tersebut kemudian dikapitalisasi melalui intervensi fasilitatif dari LSM lokal dan pemerintah daerah guna mengatasi hambatan psikologis serta memperkuat kelembagaan. Dinamika ini bermuara pada pembentukan Koperasi Perempuan sebagai titik balik perubahan posisi pekerja, dari objek yang tereksplotasi menjadi subjek ekonomi yang berdaulat. Koperasi menjalankan dua fungsi secara bersamaan, yaitu fungsi ekonomi yang bersifat ofensif untuk memperkuat daya tawar dalam penetapan harga jual bahan baku kepada pihak penyulingan secara mandiri, serta fungsi sosial yang bersifat defensif melalui pengalokasian sebagian sisa hasil usaha sebagai dana darurat kesehatan dan pendidikan bagi anggota. Melalui mekanisme substitusi fungsional yang dirancang untuk menggantikan peran jaring pengaman personal yang selama ini dijalankan oleh juragan, rantai kemiskinan dan ketergantungan akibat utang budi dapat diputus secara sistematis. Pada akhirnya, proses tersebut mendorong runtuhnya *habitus* kepatuhan semu, memudarnya ketakutan eksistensial terhadap hegemoni patron, serta terwujudnya kemandirian ekonomi perempuan pekerja yang adil dan berkelanjutan.

Akan tetapi, transisi menuju kemandirian ekonomi melalui pengorganisasian modal sosial ini menghadapi tantangan sosial-budaya yang kompleks di lapangan. Secara fenomenologis, hambatan terbesar justru muncul dari benturan psikologis berupa rasa sungkan dan utang budi kultural yang telah mengakar kuat dalam kesadaran pekerja terhadap patron. Terdapat ketakutan eksistensial bahwa memisahkan diri dan membangun daya tawar kolektif akan dipandang sebagai tindakan yang merusak hubungan baik dengan sosok yang selama ini dianggap sebagai pelindung. Ketakutan akan hilangnya jaring pengaman sosial vertikal tersebut tergambar dalam penuturan salah seorang informan:

"Kalau katong bikin kelompok sendiri lalu seng mau jual ke bos lagi, katong takut bos marah. Nanti kalau ada anak sakit pas malam-malam, siapa yang mau kasi pinjam uang cepet? Rasa segan itu yang bikin katong susah mau lepas."
(Wawancara Informan Pekerja Perempuan di Kabupaten Buru).

Kutipan tersebut mempertegas bahwa transformasi sosial tidak cukup hanya melalui pembentukan entitas ekonomi baru, tetapi juga harus diiringi dengan substitusi fungsi jaring pengaman sosial. Temuan ini sejalan dengan pandangan Fukuyama bahwa modal sosial yang terlalu terkonsentrasi ke dalam tanpa *bridging social capital* ke institusi yang lebih luas dapat melahirkan ketergantungan eksistensial terhadap struktur di luarnya. Kondisi psikologis berupa rasa segan mengonfirmasi bahwa patronase mampu mengonversi keterbatasan akses finansial pekerja menjadi instrumen kooptasi kelas yang mengikat. Agar koperasi perempuan dapat berjalan secara efektif, institusi formal tersebut harus mampu mengambil alih seluruh fungsi jaring pengaman sosial darurat yang selama ini dijalankan secara personal oleh patron. Salah satu bentuk konkretnya adalah mengalokasikan sebagian sisa hasil usaha atau kas koperasi sebagai dana simpan pinjam darurat bagi anggota yang membutuhkan biaya kesehatan atau pendidikan secara mendadak. Melalui skema substitusi fungsional tersebut,

perempuan pengurut daun kayu putih tidak hanya terbebas dari komodifikasi tubuh dan eksploitasi upah. Dengan pelebagaan solidaritas mekanik Durkheim dan perluasan *radius of trust* Fukuyama ke dalam wadah koperasi, mereka juga memiliki kesempatan untuk mendekonstruksi rasa takut yang bersifat kultural sekaligus mentransformasikan *habitus* kepatuhan semu menjadi kemandirian ekonomi yang inklusif, adil, dan berkelanjutan.

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa perempuan pengurut daun kayu putih di Kabupaten Buru memaknai pekerjaan yang menguras fisik bukan semata-mata sebagai bentuk eksploitasi, melainkan sebagai wujud pengorbanan dan tanggung jawab moral demi kelangsungan hidup keluarga. Pengalaman tubuh yang harus menahan rasa sakit, kram, dan kelelahan ekstrem hingga 10–12 jam per hari diinternalisasi sebagai realitas yang wajar bagi seorang "pejuang keluarga". Untuk menghadapi kondisi tersebut, para pekerja membangun ketahanan sosial (*social resilience*) melalui solidaritas horizontal yang erat antarsesama pekerja, seperti saling berbagi beban kerja dan kebutuhan pokok. Pada saat yang sama, mereka tetap mempertahankan relasi patron-klien dengan juragan yang dimaknai sebagai jaring pengaman sosial pada saat krisis.

Meskipun ikatan sosial dan solidaritas tersebut memberikan perlindungan subsisten dalam jangka pendek, secara struktural relasi patronase ini bersifat semu. Ketergantungan pada utang budi dan pinjaman finansial (*kasbon*) di tengah rendahnya upah sebesar Rp1.000 per kilogram justru mengunci perempuan pekerja dalam lingkaran utang. Sistem ini membatasi otonomi mereka, melanggengkan subordinasi kelas dan gender, serta mendorong eksploitasi tubuh yang berdampak pada kesehatan dalam jangka panjang. Oleh karena itu, strategi yang hanya berorientasi pada bertahan hidup perlu ditransformasikan menuju kemandirian penghidupan.

Untuk memutus rantai eksploitasi dan subordinasi tersebut, diperlukan intervensi kebijakan yang berfokus pada peningkatan literasi keuangan, pelatihan vokasional di luar sektor ekstraktif, dan pemberdayaan ekonomi berbasis kelembagaan. Kelompok sasaran utama program ini adalah perempuan pekerja pengurut daun yang masih terjebak dalam siklus utang patronase. Program pemberdayaan tersebut perlu diinisiasi dan dilaksanakan secara kolaboratif oleh Dinas Koperasi dan UKM serta Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) Kabupaten Buru. Selain itu, pelaksanaannya perlu melibatkan fasilitator dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) lokal untuk memberikan pendampingan sosial dan psikologis. Sinergi antarlembaga ini diharapkan mampu mengembangkan solidaritas pekerja menjadi Koperasi Perempuan yang mandiri sehingga mereka memiliki daya tawar kolektif, mampu mengakses pasar secara langsung, dan terbebas dari hegemoni juragan.

REFERENSI

Budiyanti, Indah, dan Arya Hadi Dharmawan. 2018. Strategi Nafkah dan Relasi Sosial Rumahtangga Petani Tebu (Studi Kasus: Desa Jenar, Kecamatan Jenar, Sragen). (*Jurnal Sains Komunikasi*

- dan Pengembangan Masyarakat Vol. 2 No. 1): 105–122. Diakses di <https://doi.org/10.29244/jskpm.2.1.105-122>.
- Bourdieu, Pierre. 1984. *Distinction: A Social Critique of the Judgement of Taste*. Cambridge; Harvard University Press.
- Creswell, John W., dan J. David Creswell. 2023. *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. Thousand Oaks; SAGE Publications.
- Daulay, P., M. C. B. Umanailo, dan S. Pujiati. 2024. Income of Women Whose Jobs Were to Sort Eucalyptus Leaves After the COVID-19 Pandemic. (*Journal of Infrastructure, Policy and Development* Vol. 8 No. 11): 1–8. Diakses di <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i11.6432>.
- Devereux, Stephen, Christophe Béné, dan John Hoddinott. 2020. Conceptualising COVID-19's Impacts on Household Food Security. (*Food Security* Vol. 12 No. 4): 769–772.
- Dilawati, Rika, Eni Zulaiha, dan Yeni Huriani. 2021. Perempuan dan Ketahanan Keluarga di Masa Pandemi COVID-19: Studi Kasus Mantan Pekerja Perempuan di Kota Bandung. (*Journal of Society and Development* Vol. 1 No. 2): 46–58. Diakses di <https://doi.org/10.57032/jsd.v1i2.41>.
- Djunaidi, Firman Gazali, A. Yusdianti Tenriawali, Abdul Khaliq, dkk. 2021. Service Quality, Customer Loyalty, and Bank Customer Satisfaction in Namlea City. (*Psychology and Education Journal* Vol. 58 No. 3): 2248–2252. Diakses di <https://doi.org/10.17762/pae.v58i3.4228>.
- Doran, J. C., P. F. Macdonell, J. J. Brophy, dan R. Davis. 2021. Eucalyptus bakeri: A Potential Source Species for Eucalyptus Oil Production in the Subtropics. (*Australian Forestry* Vol. 84 No. 4): 182–190. Diakses di <https://doi.org/10.1080/00049158.2021.1973225>.
- El Kassas, Mohamed, Haytham Abdelkader, dan Mohammed A. Medhat. 2020. COVID-19 in Egypt: Through Crisis to Adaptation; A Gastroenterologist's Perspective. (*Arab Journal of Gastroenterology* Vol. 21 No. 3): 207–210. Diakses di <https://doi.org/10.1016/j.ajg.2020.07.004>.
- Ernawati, Titik, Lailan Syaufina, dan Hariyadi. 2021. Sustainable Analysis of Integrated Cajuput Oil Business Development as a Sustainable Forestry Multi-Business at PT Inhutani I. (*Jurnal Pengelolaan Sumberdaya Alam dan Lingkungan* Vol. 11 No. 4): 631–637. Diakses di <https://doi.org/10.29244/jpsl.11.4.631-637>.
- Foucault, Michel. 1977. *Discipline and Punish: The Birth of the Prison*. New York; Vintage Books.
- Hamiru, H., M. C. B. Umanailo, H. Hehamahua, dan I. Hamid. 2019. Modal Sosial Pekerja Minyak Kayu Putih di Desa Waplau. (*JISPO: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Vol. 9 No. 2): 109–122. Diakses di <https://doi.org/10.15575/jispo.v9i2.5199>.
- Kiram, Muhammad Zawil, dan Zamzami Zamzami. 2021. Peran Perempuan dalam Mendukung Ekonomi Keluarga Studi pada Keluarga Nelayan di Dewantara Aceh Utara. (*Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Malikussaleh* Vol. 2 No. 1): 66–80.
- Pečarič, Mirko. 2022. The Concept of Holistic Group Liability. (*Cogent Social Sciences* Vol. 8 No. 1). Diakses di <https://doi.org/10.1080/23311886.2022.2045450>.
- Prastiwi, Hesti, dan Martua Sihalo. 2020. Pengaruh Konversi Lahan terhadap Strategi Pemanfaatan Modal Nafkah Rumah Tangga Buruh Tani. (*Jurnal Sains Komunikasi dan Pengembangan Masyarakat* Vol. 4 No. 3): 411–426. Diakses di <https://doi.org/10.29244/jskpm.4.3.411-426>.

- Rimbawanto, A., N. K. Kartikawati, dan F. Latumahina. 2021. Conservation and Utilization of *Melaleuca cajuputi* subsp. *cajuputi*, an Indigenous Species in Moluccas Island, Indonesia. (*IOP Conference Series: Earth and Environmental Science* Vol. 800 No. 1): 012040.
- Sabariman, Hoiril. 2019. Perempuan Pekerja (Status dan Peran Pekerja Perempuan Penjaga Warung Makan Kurnia). (*Jurnal Analisa Sosiologi* Vol. 8 No. 2). Diakses di <https://jurnal.uns.ac.id/jas/article/view/34084/27707>.
- Setiyono, Ditha Aziezah, dan Johanna Debora Imelda. 2021. Makna dan Perubahan Relasi Gender bagi Perempuan Pekerja Dadakan di Masa Pandemi COVID-19. (*Jurnal Sosiologi Reflektif* Vol. 15 No. 2): 446–473. Diakses di <https://doi.org/10.14421/jsr.v15i2.2144>.
- Smith, Husein, dan Syarifuddin Idrus. 2018. Karakteristik Minyak Kayu Putih pada Berbagai Lokasi di Maluku. (*Molucca Medica* Vol. 14 No. 2): 58–69. Diakses di <https://doi.org/10.29360/mb.v14i2.3892>.
- Sudradjat, Susana Elya. 2020. Minyak Kayu Putih, Obat Alami dengan Banyak Khasiat: Tinjauan Sistematis. (*Jurnal Kedokteran Meditek* Vol. 26 No. 2): 51–59. Diakses di <https://doi.org/10.36452/jkdoktmeditek.v26i2.1843>.
- Sumartono, Eko, dan Yani Astria. 2018. Strategi Nafkah Petani Sawit di Desa Penarik Kecamatan Penarik Kabupaten Mukomuko. (*MAHATANI: Jurnal Agribisnis* Vol. 1 No. 2): 80–95. Diakses di <https://doi.org/10.52434/mja.v1i2.457>.
- Sundler, Annelie J., Elisabeth Lindberg, Christina Nilsson, dan Lina Palmér. 2019. Qualitative Thematic Analysis Based on Descriptive Phenomenology. (*Nursing Open* Vol. 6 No. 3): 733–739. Diakses di <https://doi.org/10.1002/nop2.275>.
- Waemesse, Gerald W., Stephen F. W. Thenu, dan Ester D. Leatemia. 2020. Kontribusi Industri Pengolahan Minyak Kayu Putih terhadap Pendapatan Rumah tangga di Desa Wamana Baru Kecamatan Fena Leisela Kabupaten Buru. (*Agrilan: Jurnal Agribisnis Kepulauan* Vol. 8 No. 1): 14–28. Diakses di <https://doi.org/10.30598/agrilan.v8i1.947>.
- Williams, Heath. 2021. The Meaning of "Phenomenology": Qualitative and Philosophical Phenomenological Research Methods. (*The Qualitative Report* Vol. 26 No. 2): 366–385. Diakses di <https://doi.org/10.46743/2160-3715/2021.4587>.
- Wuryantoro, Wuryantoro, dan Candra Ayu. 2020. Strategi Nafkah Berkelanjutan Berbasis Ubi Kayu bagi Rumah Tangga Petani Miskin di Wilayah Lahan Kering Marjinal Pulau Lombok. (*Jurnal Agrimansion* Vol. 10).